

Analisis Kebijakan Akses Karya Ilmiah pada Repositori Institusi: Studi Kasus Universitas XYZ

Imam Agus Faisal^{1*)}, Fuad Gani²

^{1, 2}Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Jln. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

*Corresponding author, e-mail: imam27agus@gmail.com

Abstract

Institutional repositories have a role in managing and disseminating scientific works, but the regulation of access to these works is not consistently enforced due to differing interpretations of access rules. Previous research has largely focused on access restrictions due to concerns about plagiarism. However, research on access policies and their implementation has been limited. The purpose of this study is to analyze, interpret, and provide recommendations regarding scientific access policies in institutional repositories. The research method employed a qualitative approach using a case study design. Five informants were selected based on the criteria of being managers, administrators, and librarians responsible for uploading scholarly works. This study indicates that access policies must be standardized as clear guidelines and regulations that specify who has the authority and establish standard operating procedures (SOPs) to serve as a reference.

Keywords: *Access Policy, repository, university library*



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Pendahuluan

Perkembangan penyimpanan hasil karya ilmiah telah bertransformasi dari cetak ke digital. Penyimpanan karya ilmiah sivitas akademika saat ini telah disimpan di repository institusi. Repository adalah sistem digital yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyebarkan karya ilmiah civitas akademika. Karya tersebut dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, laporan penelitian, hingga publikasi dosen (Masoem University, n.d.). Karya ilmiah yang disimpan di repository berupa Skripsi, Tesis, Disertasi, laporan penelitian dosen hingga prosiding. repository yang umum digunakan di berbagai instansi perguruan tinggi ada berbagai macam, diantaranya Dspace, Eprint, dan Setiadi. Universitas XYZ salah satu perguruan tinggi swasta berada di Provinsi Jawa Barat sebagai tempat penelitian dalam menyimpan hasil karya ilmiah menggunakan repository Eprint. Repository institusi tidak hanya sekedar untuk menyimpan suatu karya melainkan sebagai media diseminasi informasi. Diseminasi informasi adalah tindakan penyebaran informasi serta inovasi yang dilakukan kepada khalayak, dari penyebaran informasi karya ilmiah melalui repository diharapkan memberikan manfaat pengetahuan yang semakin mudah di akses melalui jaringan internet (Siahaan, C., Tampubolon, J. A., & Sinambela, 2021). Dalam menjalankan proses diseminasi informasi karya ilmiah, Universitas XYZ menjalankan program pengelolaan repository Eprint dibawah perpustakaan Universitas XYZ dan pengunggahan dilakukan oleh masing-masing pustakawan yang ditunjuk disetiap perpustakaan fakultas.

Repository yang sudah terhubung internet memudahkan akses terhadap karya ilmiah yang telah disimpan, namun dalam praktiknya, tidak semua konten dalam repository dapat diakses secara terbuka (*open acces*) karena adanya kebijakan embargo dan akses terbatas (*close acces*). Embargo digunakan untuk memberikan waktu tertentu suatu karya ilmiah dapat diakses, sementara *close acces*

membatasi secara penuh atau tidak dapat diakses oleh umum. Tujuan penerapan embargo dan *close acces* pada repository institusi untuk membatasi akses publik terhadap konten digital tertentu sebagai upaya untuk mencegah plagiarisme, perlindungan data pribadi dan identitas informan, hak paten, upaya menghindari insiden unduh massal dan distribusi ilegal konten akademik, dan mencegah pencurian ide yang belum dipatenkan (Aliwijaya et al., 2025). Atas alasan tersebut perpustakaan Universitas XYZ juga menerapkan embargo dan *close acces* terhadap karya ilmiah berdasarkan kebijakan institusi pada pengunggahan karya ilmiah Tugas Akhir mahasiswa Vokasi, Skripsi, Tesis, dan Disertasi diterapkan pengunggahan seluruh BAB 1-5 atau Pendahuluan hingga Daftar Pustaka. Namun ada beberapa bagian seperti sampul, abstrak atau BAB tertentu yang diperbolehkan untuk *open acces*.

Kebijakan pengunggahan yang diterapkan oleh Perpustakaan Universitas XYZ meliputi karya skripsi, tesis, dan disertasi wajib diunggah ke dalam repository perguruan tinggi yang terintegrasi dengan portal nasional dan menjamin aksesibilitas publik dan mencegah upaya plagiarisme berdasarkan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 (Menteri Riset, 2018). Berdasarkan peraturan tersebut, Perpustakaan Universitas XYZ menerapkan kebijakan pengunggahan file keseluruhan ke repository dengan aturan hanya BAB 1 (Pendahuluan), BAB 3 (Metode Penelitian), dan BAB 5 (Kesimpulan) yang hanya dibuka akses untuk publik. BAB 2 (Landasan Teori), BAB 4 (Pembahasan) diterapkan *close acces*. Ada beberapa kebijakan embargo pada file karya ilmiah yang di terapkan di masing-masing pustakawan pengelola repository.

Permasalahan muncul ketika implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan secara konsisten disetiap unit perpustakaan, meskipun aturan mengenai embargo dan akses terbatas telah ditetapkan dalam praktiknya pustakawan sebagai pengelola repository memiliki interpretasi yang berbeda. Sebagian pustakawan cenderung menerapkan *open acces* sementara yang lain menerapkan *close acces*. Perbedaan cara pandang ini memunculkan inkonsisten pada layanan referensi serta tidak efektif dalam pengelolaan repository. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi yang diterapkan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap kebijakan embargo dan *close acces* dalam pengelolaan repository Perpustakaan Universitas XYZ. Khususnya melihat bagaimana kebijakan dapat dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan oleh pustakawan.

1. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kebijakan *open acees*, embargo dan *closed access* diterapkan dalam pengelolaan repository institusi?
2. Bagaimana pustakawan memaknai dan menginterpretasikan kebijakan tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsistensi implementasi kebijakan?

2. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan embargo dan *closed access* dalam repository institusi.
2. Mengidentifikasi perbedaan interpretasi pustakawan terhadap kebijakan tersebut.
3. Merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan repository.

Tinjauan Pustaka

Penggunaan repository institusi sudah mulai diterapkan pada tahun 2002 ketika Dspace muncul. Menurut Lynch (2003) Repository institusional bukan sekadar perangkat lunak atau server, melainkan komitmen organisasi universitas untuk mengelola, mendiseminasikan, dan melestarikan karya digital dari komunitas akademiknya termasuk migrasi konten antar teknologi dari waktu ke waktu. Repository institusi memiliki tiga risiko terkait pengelolaan yang dapat menyebabkan repository tidak berkembang dalam melestarikan serta diseminasi informasi. Pertama potensi penyalahgunaan IR sebagai instrumen kontrol administratif institusi atas karya intelektual yang secara tradisional berada

di bawah kendali fakultas atau peneliti. Kedua terkait kecenderungan membebani infrastruktur repositori dengan muatan kebijakan yang berlebihan dan tidak relevan dengan fungsi dasarnya. Ketiga kecenderungan institusi mendirikan repositori institusi tanpa disertai komitmen kelembagaan yang sungguh-sungguh (Lynch, 2003).

Menurut Edward III, sebagaimana dikutip oleh Subarsono (Subarsono AG, n.d.) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tergantung pada empat variabel. Pertama komunikasi, kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas, akurat dan konsisten pada pelaksanaannya. Kedua sumber daya, keberhasilan memerlukan staf yang kompeten. Ketiga Disposisi yang jelas terkait sikap atau komitmen pelaksanaan. Keempat adalah struktur birokrasi yang memiliki Standar Operasional Prosedu dan pembagian tanggung jawab yang jelas. teori tersebut melihat implementasi keempat variabel harus berjalan dan diterapkan keseluruhan. Apabila ada salah satu variabel yang tidak terpenuhi maka keberhasilan kebijakan juga tidak dapat dicapai.

Kebijakan embargo dan *close acces* di era sekarang tentu berbeda dengan semangat deklarasi Budapest Open Access Initiative (BOAI) 2002. deklarasi publik tahun 2002 yang menjadi tonggak gerakan akses terbuka (*open access*), bertujuan membebaskan literatur ilmiah di internet tanpa biaya dan batasan hak cipta. Ini mempromosikan akses gratis untuk membaca, mengunduh, dan mendistribusikan artikel jurnal, mempercepat pertukaran pengetahuan global. Dukungan akses terbuka pada arsip dan jurnal penelitian (JLIS.it, 2012). Kebijakan tersebut berbeda dengan semangat *open acces*. Hal ini menimbulkan realita dan ideal. Meskipun sekarang sedang berkembang aturan *open acces*, tidak semua dapat diterapkan kebijakan tersebut. Karena menjaga hak cipta penulis. Kebijakan embargo dan *close acces* tentu melihat adanya resiko plagiat terhadap karya atau resiko hak cipta yang hilang. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas hasil karya tulis ilmiah yang timbul secara otomatis (deklaratif) sejak diwujudkan dalam bentuk nyata, karya seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan buku dilindungi selama seumur hidup pencipta + 70 tahun, mencakup hak moral dan ekonomi yang diatur pada UU No. 28 Tahun 2014 (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Penelitian ini berlandaskan realita kebijakan yang belum diimplementasi dengan baik serta adanya perbedaan pemahaman terhadap kebijakan serta adanya deklarasi BOAI yang menekankan pada *open acces* menjadikan dilema bagi pustakawan. Di sisi lain berusaha untuk menjaga hak cipta penulis. Penelitian ini berusaha untuk memperkaya hasil temuan yang pada umumnya membahas terkait pembatasan akses dan terkait hak cipta, penelitian terkait open acces yang menjadi alat untuk mencegah plagiarisme serta teknis yang belum mendukung. Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Literatur Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Araf Aliwijaya & Safirotu Khoir	<i>Factors influencing limited repository access in academic libraries</i>	2025	Kualitatif deskriptif (Studi kasus di 3 PTN)	Menemukan bahwa pembatasan akses (<i>restricted access</i>) dipicu oleh kekhawatiran plagiarisme, perlindungan hak cipta, dan kebijakan internal kampus meskipun tren global mengarah pada <i>Open Access</i> .

2	Ni Made Lila Sri Kamala & Luki Wijayanti	Tinjauan Penerapan Kebijakan <i>Open Access Institutional Repository</i> dalam Pencegahan Plagiarisme	2024	<i>Systematic Literature Review (SLR)</i>	Menunjukkan bahwa kebijakan <i>open access</i> justru dapat menjadi alat pencegahan plagiarisme karena karya lebih mudah dilacak (indeksasi) dan meningkatkan kesadaran etika akademik.
3	Tupan & Rochani Nani Rahayu	<i>Narrative review: faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan repositori akses terbuka (open access repositories) di Indonesia</i>	2024	<i>Narrative Review (Analisis artikel 2013-2017)</i>	Pertumbuhan repositori di Indonesia masih rendah karena kendala kebijakan akses, kesulitan teknis dalam pengunggahan publikasi, infrastruktur yang kurang memadai, dan manajemen hak cipta yang belum optimal.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu berjudul “*Factors influencing limited repository access in academic libraries*” menghasilkan penelitian pembatasan akses pada repositori akademik dikarenakan adanya kekhawatiran adanya plagiarisme, perlindungan hak cipta, dan kebijakan internal kampus meskipun tren global mengarah pada *Open Access*. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait latar belakang perbedaan pustakawan yang mengelola atau bertanggung jawab pada unggahan karya ilmiah yang dipublikasikan di repositori yang masih dalam lingkup satu institusi. Sedangkan penelitian kedua berjudul “*Tinjauan Penerapan Kebijakan Open Access Institutional Repository dalam Pencegahan Plagiarisme*” menunjukkan hasil bahwa kebijakan *open access* justru dapat menjadi alat pencegahan plagiarisme karena karya lebih mudah dilacak (indeksasi) dan meningkatkan kesadaran etika akademik. Perbedaan penelitian ini pada metode penelitan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Universitas XYZ, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan SLR atau *systematic literature review*. Hasil dari penelitian terdahulu yang kedua melihat kebijakan open acces menjadi alat pencegah plagiarisme. Sedangkan penelitian ini dilakukan untuk meneliti kebijakan sistem embargo, *open acces* dan *close acces*.

Penelitian terdahulu pada nomor tiga berjudul “*Narrative review: faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan repositori akses terbuka (open access repositories) di Indonesia*” menghasilkan kesimpulan Pertumbuhan repositori di Indonesia masih rendah karena kendala kebijakan akses, kesulitan teknis dalam pengunggahan publikasi, infrastruktur yang kurang memadai, dan manajemen hak cipta yang belum optimal dengan menggunakan metode *Narrative Review (Analisis artikel 2013-2017)*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan yang diterapkan dan bagaimana pustakawan menerapkan kebijakan tersebut serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah Pendekatan yang membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan partisipan, meneliti cerita-cerita yang dikumpulkan secara naratif(Creswell, 2023). Untuk memahami bagaimana implementasi kebijaksan embargo dan akses terbatas serta interpretasi

pustakawan dalam pengelolaan repositori Perpustakaan Universitas XYZ menggunakan metode penelitian studi kasus. metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian (Walgito, 2010). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus agar dapat memahami secara mendalam dan fokus pada implementasi kebijakan embargo dan *close acces* yang diterapkan oleh pustakawan. Penelitian ini menggunakan informan pustakawan Perpustakaan Universitas XYZ dengan kriteria:

1. Pustakawan pengelola repository instansi
2. Pustakawan admin repository instansi
3. Pustakawan yang bertugas mengunggah karya ilmiah ke repository instansi.

Informan yang di pilih sebanyak lima pustakawan, dua pustakawan sebagai pengelola atau admin repository berasal dari unit perpustakaan pusat, tiga berasal dari berbagai perpustakaan fakultas yang berada di Universitas XYZ. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi (Pengamatan), interview (wawancara mendalam), serta dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan metode semi terstruktur. Menurut Magaldi dan Berler dalam Ruslin et al (2022) mendefinisikan wawancara semi terstruktur sebagai wawancara eksploratif. Mereka lebih lanjut menjelaskan bahwa wawancara semi terstruktur umumnya didasarkan pada panduan dan biasanya berfokus pada topik utama yang memberikan pola umum. Sedangkan untuk analisis data agar mendapatkan hasil yang kredibel dan validitas temuan maka digunakan triangulasi data. hal ini sejalan dengan pengertian triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014):

1. Reduksi data: Tahap awal ini menentukan tema utama terkait kebijakan embargo dan *close acces*, lalu membuat kategori atau kode untuk mempermudah analisis, dan terakhir menyusun data menjadi bagian yang lebih terstruktur.
2. Penyajian data: Menyajikan data dalam bentuk matriks hubungan. Peneliti akan memetakan kebijakan, persepsi pustakawan terkait embargo dan *close acces*
3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi: Menarik kesimpulan mengenai penerapan kebijakan dan alasan perbedaan persepsi pustakawan.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Penerapan Sistem Embargo, *Open Acces* dan *Closed Access*

Penerapan kebijakan embargor, *open acces* dan *close acces* pada repository Eprint di Universitas XYZ telah dijalankan mulai tahun 2022. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pustakawan referensi berinisial CK.

“Sudah ada SK Rektor terkait penetapan penanggung jawab Eprint dan diberi kewenangan mengelola karya ilmiah yang diunggah ke Eprints pada tahun 2022”. (Wawancara pustakawan referensi pada 1 Mei 2026).

Pernyataan pustakawan tersebut menunjukkan bahwa melalui SK rektor tahun 2022 sudah ada pembentukan tim pustakawan yang mengelola Eprint. Namun pustakawan referensi berinisial BK menyebutkan bahwa.

“Belum ada kebijakan sebagai dasar hukum”. (Wawancara pustakawan referensi berinisial BK pada 1 Mei 2026).

Perbedaan pengetahuan terkait SK dan keduanya tidak menunjukkan landasan yang jelas seperti SOP, Tugas masing-masing pustakawan serta aturan apa saja yang masuk kedalam kategori embargo dan *close acces* karya ilmiah yang akan dipublikasikan menunjukkan adanya komunikasi yang belum terjalin dengan baik. Menurut Edward III, sebagaimana dikutip oleh Subarsono (Subarsono AG, n.d.) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik salah satunya adalah komunikasi, kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas, akurat dan konsisten pada pelaksanaannya. Penerapan kebijakan harus dikomunikasikan terlebih dahulu, dapat dilakukan melalui seminar, rapat internal, maupun pembuatan instruksi terkait pengelolaan repository instansi yang akan memilih cara publikasi dengan sistem *close acces*, embargo dan *open acces*. terkait kebijakan *close acces*, embargo dan keterbukaan akses belum dimiliki oleh sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi secara formal. Utamanya kebijakan preservasi konten dan kebijakan hak cipta. Sedangkan peluang keterbukaan akses dapat meningkatkan keterpakaian publikasi ilmiah dan tantangannya berupa sumber daya serta komitmen dari seluruh sivitas akademika untuk berkontribusi (Safira, 2021). Perpustakaan di Universitas XYZ yang menggunakan sistem desentralisasi tentu membutuhkan kebijakan publik yang tepat dengan cara mengkomunikasikan kebijakan secara jelas, akurat, dan konsisten dalam pelaksanaannya. Karena pada wawancara dengan pustakawan berinisial LI menyebutkan bahwa.

“Kalau dari fakultas ada kebijakan pemimpin fakultas karena tidak berkenan adanya plagiarisme. Kalaupun ada yang open acces hanya pada daftar pustaka, cover atau pengesahan”. (Wawancara dengan pustakawan pengolahan repository fakultas A berinisial LI pada 24 Juli 2026)

Berdasarkan pernyataan pustakawan referensi berinisial BK dan pustakawan berinisial LI ada perbedaan pemahaman landasan kebijakan suatu karya ilmiah dapat dipublikasikan dengan sistem open acces, close acces atau embargo belum terlaksana dengan baik. Perbedaan kebijakan ini memperbesar risiko dalam pengembangan repository institusi. Risiko ketiga dalam pengembangan repository institusi menurut Lynch (2003) adalah kecenderungan institusi mendirikan repository institusi tanpa disertai komitmen kelembagaan yang sungguh-sungguh. Risiko terkait komitmen ini seharusnya dibangun mulai dari pembentukan SOP yang jelas dan konsisten pada penerapan publikasi di repository institusi. selain belum adanya SOP tunggal yang mengatur repository institusi, konten yang tersedia di Repository Eprint Universitas XYZ masih sebatas pada tugas akhir mahasiswa vokasi, skripsi mahasiswa tingkat sarjana, tesis karya ilmiah mahasiswa pascasarjana dan disertasi karya ilmiah mahasiswa S3. Pustakawan referensi berinisial CK serta pustakawan berinisial AK menyebutkan bahwa.

“koleksi yang tersedia di eprint mulai dari Tugas Akhir dari Sekolah Vokasi, Skripsi, dan Tesis”. (Wawancara pustakawan referensi berinisial CK pada 1 Mei 2026).

“Skripsi setiap program studi yang menyerahkan ke perpustakaan fakultas”. (Wawancara pustakawan perpustakaan fakultas E berinisial AK pada 24 Juli 2026)

Repository Universitas XYZ hingga saat ini masih menyimpan file karya ilmiah berupa, skripsi atau tugas akhir mahasiswa. Sedangkan karya ilmiah lain seperti artikel, prosiding atau lainnya belum dipublikasikan melalui repository institusi. Melihat perguruan tinggi lain seperti Universitas Surabaya menetapkan melalui SK rektor konten repository meliputi, artikel, buku, hasil konferensi, tugas akhir mahasiswa, video, modul ajar, orasi ilmiah, pidato pengukuhan, buku pedoman praktikum hingga hasil lomba karya tulis ilmiah yang mendapat predikat juara 1-3 (Ulum & Setiawan, 2016). Hal ini dapat ditempuh oleh Perpustakaan Universitas XYZ untuk membuat kebijakan terkait isi konten apa saja yang perlu di unggah dan di publikasikan melalui repository Universitas XYZ yang nantinya akan disahkan dan di SK oleh rektor.

Interpretasi dan Pemaknaan Pustakawan pada Kebijakan *Open Acces*, *Close Acces*, dan *Embargo*

Interpretasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring (2026) memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu atau tafsiran. Pustakawan di Universitas XYZ memiliki interpretasi terhadap embargo dan *close acces* yang berbeda-beda. Dalam interpretasi menurut Sharpe (1982:82) dalam Oke (2015) terdapat dua metode interpretasi yaitu interpretasi personal dan interpretasi non-personal. Interpretasi personal merupakan metode interpretasi yang membutuhkan seseorang sebagai interpreter sedangkan interpretasi nonpersonal merupakan metode interpretasi yang menggunakan benda mati. Perbedaan interpretasi terkait embargo dan *close acces* juga dialami oleh pustakawan antar personal, pustakawan referensi berinisial BK menyebutkan bahwa:

“Saya Setuju dengan embargo dan *close acces* untuk menjaga karya ilmiah dari praktik plagiat, sedangkan *open acces* juga saya setuju untuk memudahkan pengguna.”
(Wawancara pustakawan referensi berinisial BK pada 1 Mei 2026).

Sudut pandang pustakawan tersebut lebih menekankan kepada pernyataan setuju terkait *close acces* dengan alasan untuk menjaga plagiarisme pada karya ilmiah. Di sisi lain berpandangan juga terhadap *open acces* hanya memudahkan pengguna dalam mengakses pengetahuan. Sedangkan pandangan interpretasi terhadap embargo dan *close acces* tidak sepenuhnya satu pendapat dengan pustakawan referensi berinisial CK lebih memilih keterbukaan akses pada karya ilmiah yang telah dipublikasikan melalui repositori institusi. Pustakawan tersebut berpendapat bahwa

“Secara personal saya lebih memilih *open acces* karena keterbukaan pengetahuan dan informasi.” (Wawancara pustakawan referensi berinisial BK pada 1 Mei 2026).

Perbedaan pandangan terkait sistem *open* dan *close acces* serta embargo menyebabkan perbedaan pengunggahan pada setiap karya ilmiah yang telah dipublikasikan melalui repositori institusi. Secara umum dalam penelitian yang dikemukakan oleh A. Aliwijaya, dkk (Aliwijaya et al., 2026) menyebutkan bahwa ada empat model kebijakan akses repositori kontemporer. Pertama Akses Terbuka Penuh (*Open Access* - Perpustakaan A): Konsisten menyediakan akses teks lengkap (*full-text*) bagi semua pengguna dari mana saja sejak 2007, meskipun terdapat beberapa permintaan *take-down* dari dosen untuk konten tertentu. Kedua Akses Berbeda untuk Konten Berbeda (Perpustakaan B): Akses publik dibatasi hanya untuk Bab 1 dan Bab 5. Mahasiswa internal dapat meminta akses penuh atas persetujuan dosen pembimbing. Ketiga Akses Khusus Anggota Institusi (Perpustakaan C): Akses hanya dibuka untuk civitas akademika internal menggunakan akun *Single Sign-On* (SSO). Dan keempat Akses Pengguna Terbatas (Perpustakaan D): Pengguna hanya dapat mengakses repositori tugas akhir (*Electronic Theses and Dissertations* / ETD) secara langsung melalui komputer yang disediakan di area perpustakaan (on-site).

Pustakawan yang melakukan open akses secara penuh juga pernah mengalami dilema dan masalah yang muncul ketika mahasiswa atau dosen meminta take down karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Pustakawan referensi berinisial AK menyampaikan bahwa:

“Dilema, karena penulis tiba-tiba meminta *close acces*. Sedangkan pustakawan sudah menyetujui dan mengunggah *open acces*.” (Wawancara pustakawan referensi berinisial AK pada 3 Mei 2026).

Permasalahan yang terjadi ketika *open acces* memang banyak terjadi di perguruan tinggi, termasuk di Universitas XYZ. Salah satu cara untuk mengantisipasi permasalahan agar tidak terjadi kembali dengan cara meningkatkan sumber daya, keberhasilan memerlukan staf yang kompeten dan disposisi yang jelas terkait sikap atau komitmen pelaksanaan (Subarsono AG, n.d.). Dengan memiliki SDM yang kompeten akan memudahkan dalam penyelesaian dan antisipasi permasalahan yang akan

terjadi. Selain sumber daya manusia, dibutuhkan disposisi yang jelas terkait sikap. Permasalahan tersebut muncul tidak hanya terkait sumber daya maupun interpretasi pustakawan yang berbeda-beda. Tetapi permasalahan utama adalah tidak adanya SOP, aturan baku yang menjadi acuan dalam bekerja menerima dan mengelola karya ilmiah yang akan di publikasikan melalui repositori institusi. Karena belum adanya SOP yang jelas serta pustakawan sebagai orang yang bertanggung jawab pada suatu karya ilmiah membuat kesulitan dalam menentukan secara tegas karya tersebut *open acces*, embargo, atau *close acces*. Bagaimanapun juga pemilik atau penulis memiliki kewenangan lebih pada karya tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pustakawan berinisial NA.

“Lebih kepada kesulitan pada penentuan publikasi *open acces*, embargo atau *close acces* karena menunggu keputusan dari dosen terkait yang dibutuhkan persetujuannya”. (Wawancara pustakawan pengelola repositori perpustakaan fakultas U pada 22 Juli 2026)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dan pengaruh kekuasaan (pemilik karya) mempengaruhi pustakawan dalam memutuskan karya ilmiah akan di publikasikan *open acces* atau tidak. Hal ini juga berkaitan dengan relasi kuasa sosial antara pustakawan dengan dosen atau penulis karya ilmiah. Relasi kuasa menurut Foucault dalam Priyanto (2017) adalah kuasa tidak berasal dari luar tetapi dari dalam. Kuasa menjalankan perannya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu sehingga menghasilkan semacam rantai kekuasaan. Lebih jauh lagi. Berasal dari pandangan relasi kuasa tersebut. Dapat dilihat bahwa kekuasaan tidak hanya sekedar pimpinan dengan staf atau yang tertera pada struktur organisasi, dalam ranah publikasi, dosen atau mahasiswa memiliki kuasa atas karya mereka, sedangkan pustakawan tidak memiliki kuasa lebih seperti penulis. Sehingga menambah kebimbangan dan keraguan pustakawan dalam mempublikasikan karya ilmiah tersebut. Hal ini juga terlihat pada pernyataan pustakawan tersebut yang harus menunggu persetujuan dosen agar diproses ke dalam repositori institusi. Sehingga tidak hanya mempengaruhi kebijakan saja, namun mempengaruhi kecepatan dalam penyimpanan karya ilmiah serta diseminasi informasi yang terhambat.

Upaya Konsistensi Penerapan Kebijakan

Kebijakan akses di lapangan jauh lebih kompleks dari pada tipologi yang ada di literatur karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknis, normatif, dan administratif secara bersamaan (Aliwijaya et al., 2026). Salah satu yang membuat ketidak konsistenan pada penerapan embargo, *close acces* dan *open acces* adalah faktor administratif. Pustakawan referensi berinisial CK menyebutkan bahwa.

“Karena kami belum memiliki aturan dan SOP terkait embargo, *open acces* dan *close acces* menjadikan perbedaan pandangan dan pengunggahan pada setiap karya ilmiah yang di publikasikan di Eprint.” (Wawancara pustakawan referensi berinisial CK pada 3 Mei 2026).

Selain belum memiliki aturan dan SOP yang jelas sebagai acuan terkait embargo dan *close acces*. Unit perpustakaan selaku penanggung jawab terkait repository instansi juga belum mengadakan pelatihan atau penyamaan persepsi terkait file karya ilmiah apa saja yang digolongkan ke dalam embargo, masuk kategori *close acces* atau file yang dapat dipublikasikan dengan sistem *open acces*. Pustakawan referensi berinisial NA juga memaparkan demikian.

“Sejauh ini hanya ada sosialisasi penggunaan Eprint dan mengikuti aturan publikasi dari Perpustakaan Pusat. Namun seiring berjalannya waktu, ada kebijakan pemimpin fakultas tidak memperbolehkan semua dipublikasi. Hanya abstrak dan BAB 1 boleh di publikasikan”, (Wawancara pustakawan berinisial NA pustakawan fakultas U pada 22 Juli 2026).

Kebijakan akses yang belum memiliki SOP yang jelas dan terukur, interpretasi pustakawan terhadap embargo dan *close acces* dapat dipandang menggunakan model Matland. Matland (1995) membagi karakteristik kebijakan berdasarkan dua variabel. Konflik Kebijakan (*Policy Conflict*) terjadi ketika berbagai organisasi atau aktor yang saling bergantung memiliki tujuan atau cara pandang yang tidak selaras mengenai suatu kebijakan. Konflik meningkat jika kepentingan atau nilai-nilai yang dipertaruhkan oleh para aktor bersifat bertolak belakang (*zero-sum*). Kedua Ambiguitas Kebijakan (*Policy Ambiguity*) dapat berupa ambiguitas tujuan (ketidakjelasan arah atau standar evaluasi naskah kebijakan) maupun ambiguitas cara/alat (ketidakjelasan teknologi, metode, atau peran organisasi untuk mencapai tujuan tersebut). Ambiguitas kebijakan dan adanya konflik kebijakan tersebut menunjukkan kebutuhan pustakawan pada SOP yang terstruktur serta komando yang jelas. pustakawan referensi berinisial CK juga menyebutkan bahwa.

“Harusnya pembuatan SOP sejak dulu dan penambahan fitur Eprint agar embargo selesai otomatis terpublikasikan serta ada notifikasi terkait berakhirnya embargo.”
(Wawancara pustakawan referensi perpustakaan O berinisial CK pada 1 Mei 2026).

Program diseminasi informasi melalui repositori institusi tentu yang pertama harus memiliki SOP guna mendukung keberlanjutan pengelolaan repositori institusi. Selain SOP tentu ada kebutuhan pustakawan dalam mendukung kebijakan yang akan dilaksanakan. Salah satunya dibutuhkan adanya penambahan fitur yang ada di Eprint sebagai aplikasi repositori instansi. Hal ini memudahkan dalam pengelolaan, pengunggahan terkait sistem embargo dan *close acces* serta kemudahan dalam penulisan informasi. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pustakawan LI.

“Saya berharap sistem pencariannya lebih mudah untuk digunakan. Kalau sekarang masih kesulitan dalam pencarian misal mencari dengan kata kunci nama terkadang tidak muncul. Sehingga hal tersebut patut diperbaiki. Serta SOP harus ada secara tertulis dan disampaikan di website”. (Wawancara pustakawan referensi perpustakaan fakultas A berinisial LI pada 24 Juli 2026).

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan embargo, *open acces* dan *close acces* masih dipahami dan diinterpretasikan oleh pustakawan dengan berbagai pemaknaan. Hal ini disebabkan karena landasan pelaksanaan publikasi di repositori instansi hanya berlandaskan SK Rektor tahun 2022 kebijakan tersebut tidak didukung SOP tertulis. Pengaturan akses karya ilmiah dipengaruhi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan fakultas serta permintaan dosen, mahasiswa (penulis) juga mempengaruhi status akses. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan akses karya ilmiah pada repositori tidak hanya ditentukan oleh kebijakan perpustakaan, tetapi terbentuk melalui struktur kelembagaan, regulasi fakultas, permintaan dosen, dan interpretasi pustakawan. Perguruan tinggi atau perpustakaan dalam mengelola repository institusi perlu menyusun kebijakan akses yang lebih terstandar, memperjelas kewenangan masing-masing, serta menyusun SOP yang menjadi acuan bersama bagi pustakawan dan sivitas akademika.

Daftar Pustaka

- Aliwijaya, A., Khoir, S., Utara, J. T., Kidul, P., Mlati, K., Sleman, K., & Istimewa, D. (2025). *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi Factors influencing limited repository access in academic libraries Faktor-faktor yang memengaruhi pembatasan akses repositori perpustakaan perguruan tinggi*. 21(1). <https://doi.org/10.22146/bip.v21i1.14134>
- Aliwijaya, A., Mubarakah, A., Yasmidar, N., Suryadi, A., Yanti, N., & Saputra, A. (2026). *Academic library*

repository access policy in Indonesia : recent policy updates. 6(3).

- Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- JLIS.it, R. (2012). Budapest Open Access Initiative (2002). *JLIS.It*, 3. <https://doi.org/10.4403/jlis.it-8629>
- Kemdikbud, P. B. (2026). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring)*. <https://kbbi.web.id/interpretasi>
- Lynch, C. A. (2003). *Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age*. <https://www.cni.org/publications/cliffs-pubs/institutional-repositories-infrastructure-for-scholarship>
- Masoem University. (n.d.). *Apa Itu Repository Perguruan Tinggi? Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya bagi Mahasiswa dan Dosen*. <https://masoemuniversity.ac.id/artikel/apa-itu-repository-perguruan-tinggi-pengertian-fungsi-dan-manfaatnya-bagi-mahasiswa-dan-dosen/>
- Matland, R. (1995). Richard E. Matland (1995) "Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2): 145-174. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5, 145–174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- Menteri Riset, T. dan P. T. (2018). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia No 50 Tahun 2018*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/140587/permen-ristekdikti-no-50-tahun-2018>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* Sage (Tjetjep Rohindi Rohidi (ed.); 3rd ed.). Sage Publications.
- Oke Laksmi Noor Vibriyani Siti Hasanah Erry Sukriah, & Rosita. (2015). Analisis Peningkatan Kinerja Metode Interpretasi Museum Pos Indonesia di Kota Bandung Berdasarkan Kepuasan Pengunjung. *Jurnal Manajemen Resort & Leisure*, 12(1), 1–10. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jurel/article/view/1040/694>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 28 Tahun 2014* (Issue 1).
- Priyanto, J. (2017). Relasi kuasa dan pengetahuan foucolt. *THAQĀFIYYĀT*, 18(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/download/1316/797/2748>
- Ruslin, R., Mashuri, S., Sarib, M., Alhabsyi, F., & Syam, H. (2022). *Semi-structured Interview: A Methodological Reflection on the Development of a Qualitative Research Instrument in Educational Studies Ruslin*. Vol. 12, 22–29. <https://doi.org/10.9790/7388-1201052229>
- Safira, F. (2021). Kebijakan Open Access Repositori Institusi di Perpustakaan Perguruan Tinggi: Kajian Best Practice Studi Literature. *Pustakaloka*, 13, 116–136. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v13i1.2457>
- Siahaan, C., Tampubolon, J. A., & Sinambela, N. B. (2021). Diseminasi Informasi Melalui Media Online Sebagai Transformasi Media Konvensional. *JURNAL SIGNAL*, 9(2), 322–324.
- Subarsono AG. (n.d.). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulum, A., & Setiawan, E. (2016). Analisis Konten dan Kebijakan Akses Institutional Repository.

Pustakaloka, 8, 157. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v8i1.476>

Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Andi Offset.